

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi di dalam peraturan perundang-undangan telah dinyatakan secara tegas bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting daripada pembangunan nasional secara komprehensif dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses kinerja antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2004).

Indonesia sebagai negara berkembang, terus berupaya melakukan pembangunan disegala sektor, baik pembangunan yang berupa fisik maupun mental, hal tersebut untuk meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus mendukung tercapainya suatu tujuan nasional. Pembangunan nasional mempunyai tujuan umum untuk meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat maupun kemakmuran yang adil dan merata. Secara umum pembangunan diartikan sebagai suatu proses terencana ke situasi nasional yang lebih baik, dalam hal ini pembangunan merupakan suatu konsep yang dinamis dikarenakan selalu berubah sesuai dengan kondisi kerangka sistem sosial yang menyertainya. Pelaksanaan pembangunan diupayakan berjalan seimbang, selaras dan saling menunjang antara

satu bidang dengan bidang lainnya, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara semua bidang (Arsyad, 1997).

Sejak diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada bulan Januari 2001 menyebabkan daerah-daerah tingkat II yang ada di Indonesia harus membiayai pembangunan daerahnya masing-masing tanpa menunggu subsidi dari Pemerintah Pusat, karena adanya peralihan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pembangunan di daerah terutama bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat dengan memberikan kesempatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai daerah otonom.

Awalnya sentralisasi identik dengan paham sosialis, sebuah ideologi yang muncul sebagai reaksi atas liberalisme. Berbeda dengan liberalisme yang menjunjung tinggi individualitas, sosialisme menitikberatkan pada kolektivitas terhadap usaha individu dalam kelompok untuk saling mensejahterakan satu sama lain. Maka tidak heran jika ciri utama dari paham ini adalah pemerataan sosial dan penghapusan kemiskinan yang dimungkinkan terjadi jika terdapat satu komando kepemimpinan terpusat (sentral) yang berwenang dalam menyetarakan hak-hak individu.

Hal ini pernah terjadi di Indonesia selama 32 tahun di dalam rezim orde baru nampaknya dijadikan pelajaran bahwa sistem sentralisasi Pemerintah mengakibatkan terhambatnya sebagian besar sistem ekonomi sarana atau prasarana di daerah. Seharusnya hal ini tidak terjadi, jika Pemerintah dapat mengalokasikan secara adil pendapatan pusat pada daerah ataupun pendapatan daerah yang disetorkan pada Pemerintah Pusat. Namun, yang terjadi justru

sebaliknya alokasi tidak jelas dan disalahgunakan oleh pimpinan daerah pada saat itu (Hamzahasadullah, 2009).

Lengsernya penguasa orde baru, Bapak Soeharto pada Mei 1998, menandai masuknya Indonesia ke dalam babak baru sejarah. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 1999, disahkanlah UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang-undang ini kemudian direvisi dengan terbitnya UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa desentralisasi dengan penerapan Otonomi Daerah sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Otonomi daerah merupakan jalan keluar bagi ancaman disintegralsasi bangsa yang pada saat itu dirasakan semakin menguat sebagai akibat kurang diperhatikannya daerah-daerah selama ini. Padahal potensi kekayaan daerah yang sangat besar diangkut ke pusat, sementara daerah hanya mendapat sisanya saja.

Indonesia tentunya belajar dari pengalaman. Sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi saat reformasi bergulir. Kewenangan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri akhirnya terwujud. Asas penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sehingga terdapat Pemerintah Daerah dan daerah otonom atau wilayah yang bersifat administratif. Hal ini bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spirituil.

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah (Halim, 2004). Berdasarkan pengertian diatas, mengandung suatu implikasi bahwa kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan dan kekuasaan yang lebih luas bagi pemerintah daerah (khususnya pada tingkat kabupaten/kota) untuk melakukan berbagai kebijakan publik berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah di daerahnya masing-masing.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan pembangunan diseluruh daerah dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia di masing-masing daerah. Pemerintah Daerah dituntut lebih aktif dalam mengelola dana yang dikuasai secara efektif dan efisien. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

Berbagai sumber penerimaan Pemerintah terus digali dan diupayakan untuk menunjang pembangunan. Dengan adanya sumber penerimaan, Pemerintah Daerah dapat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan melaksanakan pembangunan berdasarkan prioritas serta tujuan yang akan dicapai. Kemandirian keuangan yang dimiliki Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Kemampuan tersebut berupa penggalian dan pemobilisasian sumber-sumber

pendapatan daerah. Sesuai UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, didalamnya menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari: (1)Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; (2)Dana perimbangan meliputi: dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK); (3)Pinjaman daerah, (4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Secara administratif wilayah Propinsi DIY terdiri dari 1 Kotamadya dan 4 Kabupaten. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Nasional tahun 2010, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Propinsi DIY telah mencapai Rp. 9.860.700 per tahun berada jauh dari rata-rata nasional yang mencapai Rp. 15.840.400 dan menempati urutan ke 22 dari seluruh propinsi yang ada. Tingkat pertumbuhan PDRB penduduk Propinsi DIY juga termasuk yang terendah dengan menempati urutan ke 28 dari seluruh propinsi yang ada (tingkat pertumbuhan Propinsi DIY 3,68, rata-rata nasional 5,48). Propinsi DIY merupakan daerah terpadat kedua penduduknya di Indonesia setelah DKI Jakarta. Rata-rata tingkat kepadatan tertinggi sekitar 12.228 jiwa/km<sup>2</sup> di Propinsi DIY.

Pertumbuhan riil dari tahun ke tahun setiap agregat ekonomi dipergunakan PDRB atas dasar harga konstan, sehingga angka-angkanya sudah terbebas dari pengaruh inflasi. PDRB merupakan salah satu ukuran tingkat keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang memuat gambaran perekonomian regional secara makro. Berikut ditampilkan Tabel 1.1 mengenai gambaran PDRB Propinsi DIY atas dasar harga konstan 2000 menurut kabupaten/kota tahun 2005 – 2009.

**Tabel 1.1**  
**PDRB Propinsi DIY Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut**  
**Kabupaten/Kota Tahun 2005 – 2009 (Juta Rupiah)**

| Kabupaten/Kota | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kulon Progo    | 1.465.477 | 1.524.848 | 1.587.630 | 1.662.370 | 1.728.304 |
| Bantul         | 3.234.173 | 3.299.646 | 3.448.949 | 3.618.060 | 3.779.948 |
| Gunung Kidul   | 2.726.389 | 2.830.583 | 2.941.288 | 3.070.298 | 3.199.316 |
| Sleman         | 5.080.563 | 5.309.059 | 5.553.593 | 5.838.246 | 6.099.557 |
| Yogyakarta     | 4.399.902 | 4.572.504 | 4.776.401 | 5.021.149 | 5.244.851 |

Sumber : DIY Dalam Angka Tahun 2005 – 2009.

Dari sisi kewilayahan, perkembangan PDRB di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun terus meningkat. Bila dibandingkan dengan PDRB di Kabupaten lainnya Kabupaten Sleman lebih unggul. Efek kenaikan BBM pada penghujung 2005, gempa bumi dan kemarau panjang yang terjadi di Propinsi DIY di tahun 2006 merupakan salah satu penyebab terjadinya perlambatan tersebut. Memang ada indikasi kuat terjadinya ketimpangan aktivitas ekonomi antar daerah di DIY.

Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Pemerintah dalam menjalankan organisasi pemerintahannya memerlukan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatannya. Salah satu penerimaan Pemerintah tersebut berasal dari PAD. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi

penerimaan PAD hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). PAD yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lainnya, begitu juga sebaliknya, karena itu terjadi ketimpangan PAD. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah.

Demikian juga dengan Kabupaten Sleman selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, banyaknya jumlah penduduk meningkat dari 905.869 jiwa pada tahun 2005 menjadi 1.053.500 jiwa pada tahun 2009 dengan rata-rata kepadatan sebesar 1.918 jiwa per km<sup>2</sup>. Dibanding tahun 2008, jumlah penduduk meningkat 1,14% yaitu dari 1.040.220 jiwa menjadi 1.053.500 jiwa pada tahun 2009. Perekonomian mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,21% per tahun selama periode tahun 2006 – 2010. Banyaknya unit usaha dalam periode yang sama meningkat rata-rata 1,70% per tahun dan penyerapan tenaga kerja meningkat rata-rata 5,12% per tahun.

Perekonomian Kabupaten Sleman dilakukan secara moderat, dengan pertimbangan bahwa peluang untuk tumbuh memang terbuka, namun berbagai variabel makro seperti kenaikan BBM, kondisi keamanan yang belum kondusif, dan sebagainya menjadi penghambat yang tidak memungkinkan perekonomian Kabupaten Sleman tumbuh dengan cepat selama periode tahun 2006 – 2010.

Berikut pada Tabel 1.2 menunjukkan laju pertumbuhan sektor-sektor dan PDRB di Kabupaten Sleman selama tahun 2006 – 2010.

**Tabel 1.2**  
**Laju Pertumbuhan Sektor dan (PDRB) Kabupaten Sleman Tahun 2006 – 2010 (%)**

| No | Lapangan Usaha                           | Tahun |       |       |       |       |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
| 1  | Pertanian                                | 3,35  | 3,36  | 3,26  | 3,16  | 3,06  |
| 2  | Pertambangan dan Penggalian              | 7,42  | 7,46  | 6,93  | 6,48  | 6,09  |
| 3  | Industri Pengolahan                      | 7,27  | 7,31  | 7,44  | 7,51  | 7,53  |
| 4  | Listrik, Gas dan Air Bersih              | 2,01  | 2,02  | 1,80  | 1,63  | 1,47  |
| 5  | Bangunan                                 | 4,09  | 4,11  | 3,95  | 3,80  | 3,66  |
| 6  | Perdagangan, Hotel dan Restoran          | 3,71  | 3,73  | 3,64  | 3,56  | 3,48  |
| 7  | Pengangkutan dan Komunikasi              | 3,14  | 3,16  | 3,08  | 3,01  | 2,94  |
| 8  | Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan | 4,38  | 4,40  | 4,73  | 5,15  | 5,66  |
| 9  | Jasa-jasa                                | 2,38  | 2,39  | 2,33  | 2,28  | 2,23  |
|    | PDRB                                     | 4,16% | 4,18% | 4,19% | 4,22% | 4,26% |
|    | Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi       | 4,21% |       |       |       |       |

Sumber: Sleman Dalam Angka Tahun 2006 – 2010.

Sektor-sektor yang menjadi sektor utama dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Sleman tahun 2006 – 2010 tetap pada sektor sekunder dan tersier yaitu sektor jasa perdagangan, hotel dan restoran, dan industri pengolahan, ditunjang oleh perkembangan peranan sektor pertanian. Banyaknya

industri di Kabupaten Sleman pada tahun 2007 mencapai 89 perusahaan. Tahun 2008 meningkat menjadi 93 perusahaan. Jumlah industri ini terus meningkat pada tahun 2009 yang mencapai 100 perusahaan. Lebih dari setengah yaitu 51,90% industri terdapat di wilayah barat (Kecamatan Moyudan, Minggir, Seyegan, Godean, dan Gamping). Sebaliknya, 8% yang berada di wilayah barat, sedang selebihnya berada di wilayah tengah dan timur.

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola PAD. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi, 2010). Pada Tabel 1.3 dapat dilihat total PAD dan laju pertumbuhan masing-masing sumber PAD Kabupaten Sleman tahun 2006 – 2010.

**Tabel 1.3**  
**Total PAD (Ribuan Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Masing-masing**  
**Sumber PAD Kabupaten Sleman Tahun 2006 – 2010 (%)**

| Sumber PAD | 2006              |             | 2007               |              | 2008               |              | 2009               |              | 2010               |              |
|------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
|            | PAD               | %           | PAD                | %            | PAD                | %            | PAD                | %            | PAD                | %            |
| PD         | 37.979.313        | 5,40        | 50.287.666         | 6,10         | 61.020.899         | 6,45         | 71.044.731         | 7,13         | 64.550.000         | 6,55         |
| RD         | 34.867.832        | 4,96        | 40.965.628         | 4,97         | 52.065.472         | 5,50         | 54.719.439         | 5,49         | 55.775.994         | 5,66         |
| BUMD       | 5.048.288         | 0,72        | 5.732.298          | 0,69         | 6.676.981          | 0,71         | 9.973.164          | 1,00         | 10.049.161         | 1,02         |
| Lain       | 12.814.662        | 1,82        | 23.670.957         | 2,87         | 20.868.007         | 2,20         | 21.493.934         | 2,16         | 16.697.380         | 1,69         |
| <b>PAD</b> | <b>90.710.095</b> | <b>12,9</b> | <b>120.656.549</b> | <b>14,63</b> | <b>140.631.359</b> | <b>14,86</b> | <b>157.231.267</b> | <b>15,78</b> | <b>147.072.535</b> | <b>14,93</b> |

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Tahun 2006 – 2010.

Laju pertumbuhan seluruh sumber PAD Kabupaten Sleman tahun 2006 – 2010 mengalami peningkatan. Pajak daerah masih merupakan sumber PAD yang utama di Kabupaten Sleman, yaitu mampu memberikan kontribusi terhadap PAD yang lebih besar dari 50%, bahkan menunjukkan kontribusi bahwa pajak daerah

terhadap PAD Kabupaten Sleman semakin meningkat. Untuk retribusi daerah masih merupakan sumber PAD yang kedua.

Mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilaksanakan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak atau retribusi dan mengelola sumber daya alam.

Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam desentralisasi fiskal, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting. Dana perimbangan merupakan inti dari desentralisasi fiskal. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan salah satu bentuk hubungan dari sekian banyak hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan suatu sistem hubungan keuangan yang bersifat vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah (*intergovernmental fiscal relations system*), sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dalam bentuk penyerahan sebagian wewenang pemerintahan. Dengan adanya otonomi daerah ini

berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah *financial*.

Ada perbedaan sudut pandang di dalam menyikapi masalah dana perimbangan ini. Di satu sisi, adanya dana perimbangan dalam otonomi daerah merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Pusat atas berjalannya proses otonomi daerah. Hal ini juga sebagai wujud bahwa walaupun sistem yang diterapkan adalah sistem otonomi daerah, akan tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun di sisi yang lain, adanya dana perimbangan yang terlalu besar akan menimbulkan persepsi bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal dan akan sampai pada kesimpulan akhir bahwa otonomi daerah tidak efektif untuk dilaksanakan.

Permasalahan timbul ketika daerah meminta DAU sesuai kebutuhannya. Namun disisi lain, alokasi DAU berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing-masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja). Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien. Dengan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat tersebut bagi Pemerintah Daerah merupakan sumber pendanaan dalam pelaksanaan kewenangannya. Namun dalam kenyataannya, transfer dana tersebut merupakan sumber dana utama Pemerintah Daerah untuk membiayai belanja daerah. Seharusnya kekurangan dari transfer dana tersebut diharapkan

dapat diambil dari sumber pendanaan Pemerintah Daerah itu sendiri yaitu dari PAD.

Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa di antara 4 kabupaten yang ada di Propinsi DIY, yaitu kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kodya Yogyakarta, yang memperoleh DAU paling besar dan hampir tiap tahunnya adalah Kabupaten Sleman. Penggunaan DAU sebagai patokan dalam pemilihan lokasi penelitian karena DAU merupakan komponen terbesar dalam Dana Perimbangan, yaitu sekitar 75% dari total dana perimbangan, yang bermakna daerah masih sangat tergantung bantuan dari pusat untuk membiayai segala kewajibannya terkait dengan pembangunan dan pemerintahan. Hal tersebut bukan merupakan sinyal positif yang mendukung tujuan kemandirian daerah, karena ternyata otonomi belum dapat mengurangi ketergantungan daerah seperti yang terjadi pada era sebelumnya. Pada Tabel 1.4 terlihat besarnya DAU dan PAD terhadap pendapatan di Kabupaten Sleman tahun 2006 – 2010.

**Tabel 1.4**

**Total DAU dan PAD Kabupaten Sleman Tahun 2006 – 2010 (Ribuan Rupiah)**

| <b>Tahun</b> | <b>DAU</b>  | <b>PAD</b>  |
|--------------|-------------|-------------|
| 2006         | 485.397.000 | 90.710.095  |
| 2007         | 543.065.000 | 120.656.549 |
| 2008         | 592.594.528 | 140.631.359 |
| 2009         | 587.857.778 | 157.231.267 |
| 2010         | 563.320.892 | 147.072.535 |

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Tahun 2006 – 2010.

Jika dilihat dari tabel diatas, total DAU lebih besar dibandingkan dengan total PAD. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hampir di semua daerah prosentase PAD relatif lebih kecil sekitar 25% dari total penerimaan daerah. Pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan-sumbangan lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah. Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas. Rendahnya PAD suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pusat.

Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari perkembangan perekonomian, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar daerah, antar penduduk dan antar sektor. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antar daerah menjadi besar. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil judul penelitian **“ANALISIS PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 1990 – 2009”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang telah di susun dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman pada tahun 1990 – 2009.
- 2) Bagaimana jumlah PDRB per kapita berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman pada tahun 1990 – 2009.
- 3) Bagaimana jumlah industri berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman pada tahun 1990 – 2009.
- 4) Bagaimana jumlah penduduk, jumlah PDRB per kapita dan jumlah industri berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Sleman pada tahun 1990 – 2009.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap PAD Kabupaten Sleman pada tahun 1990 – 2009.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah PDRB per kapita terhadap PAD Kabupaten Sleman pada tahun 1990 – 2009.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah industri terhadap PAD Kabupaten Sleman pada tahun 1990 – 2009.

- 4) Untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah penduduk, jumlah PDRB per kapita dan jumlah industri secara bersama-sama terhadap PAD Kabupaten Sleman pada tahun 1990 – 2009.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk:

- 1) Bagi Pemerintah Daerah, dalam hal ini bagian keuangan Kabupaten Sleman diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran, masukan dan analisis dalam menentukan kebijaksanaan keuangan daerah dimasa yang akan datang.
- 2) Bagi masyarakat umum, sebagai bahan referensi serta membantu memberikan suatu pengetahuan dan kajian mengenai kondisi keuangan daerahnya khususnya di Kabupaten Sleman.
- 3) Bagi Mahasiswa/Peneliti, sebagai wujud penerapan dan pengamalan ilmu yang telah didapatkan pada masa kuliah yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **1.5. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka dituliskan beberapa hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Adanya pengaruh positif dan signifikan antara jumlah penduduk terhadap PAD Kabupaten Sleman tahun 1990 – 2009.

- 2) Adanya pengaruh positif dan signifikan antara jumlah PDRB per kapita terhadap PAD Kabupaten Sleman tahun 1990 – 2009.
- 3) Adanya pengaruh positif dan signifikan antara jumlah industri terhadap PAD Kabupaten Sleman tahun 1990 – 2009.
- 4) Adanya pengaruh positif dan signifikan antara jumlah penduduk, jumlah PDRB per kapita dan jumlah industri terhadap PAD Kabupaten Sleman tahun 1990 – 2009.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dalam setiap babnya akan dirinci menjadi sub-sub bab yang relevan serta terdapat keterkaitan dengan pembahasan bab secara keseluruhan. Agar dalam penyusunan skripsi ini dapat memberikan gambaran yang jelas maka penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I      PENDAHULUAN**

Bagian dari bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Hipotesis, serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II     TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka ini menjelaskan tentang teori-teori dan studi terkait atau penelitian sebelumnya sebagai hasil dari studi pustaka. Teori-teori yang diperoleh akan menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan pembahasan mengenai judul yang sudah ditentukan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan kondisi gambaran umum wilayah yang akan dilakukan penelitian serta metode penelitian yang akan digunakan untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS HASIL PEMBAHASAN**

Bab ini berisi kondisi gambaran umum wilayah yang akan dilakukan penelitian serta semua data-data yang dihasilkan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yang sudah ditentukan.

### **BAB V PENUTUP**

Bagian dari bab ini memuat tentang uraian mengenai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran-saran yang dapat penulis ajukan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait sehubungan dengan penelitian yang sudah dilakukan.